



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KONEKTIVITAS SISTEM PEMBAYARAN REGIONAL KAWASAN ASEAN

Venti Eka Satya
Analisis Legislatif Ahli Madya
venti.satya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada tanggal 14 November 2022, bank sentral dari lima negara di Asia Tenggara telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan pada 14 November 2022 di Bali. Bank sentral dari kelima negara tersebut adalah Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Banko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTI) G20. Presiden meminta agar kerja sama ini diformalkan dalam *regional payment connectivity*.

Kerja sama konektivitas pembayaran kawasan ini merupakan terobosan yang inovatif untuk mewujudkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif, melalui sistem pembayaran, termasuk *QR code* dan *fast payment*. Interkoneksi pembayaran lintas batas ini tentunya akan memberikan kemudahan pada akses pembayaran dan berdampak positif terhadap perekonomian kawasan. Sebelumnya, BI telah melakukan 3 inisiatif sebagai bentuk aksi kolektif, kolaboratif dan inklusif di antara negara maju dan berkembang. *Pertama*, percepatan konsolidasi industri sistem pembayaran yang terdiri atas perbankan maupun *fintech*. *Kedua*, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi, mendukung interoperabilitas dan interkoneksi, dengan inisiatif berupa Standar Open API Pembayaran (SNAP), ekspansi 15 juta pengguna QRIS dan BI-FAST. *Ketiga*, sinergi dan koordinasi yang mencakup elektronifikasi, integrasi transformasi, serta digitalisasi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Indonesia juga sudah menyusun *Blue Print* Sistem Pembayaran 2025 untuk mendukung digitalisasi sistem pembayaran.

Kolaborasi bersama ini juga sekaligus mendukung cita-cita ASEAN untuk memiliki konektivitas sistem pembayaran yang akan memungkinkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau di kawasan. Dengan adanya konektivitas sistem pembayaran ini, Asean telah selangkah lebih maju dibandingkan negara kawasan lainnya dalam implementasi interkoneksi pembayaran lintas batas. Itu terwujud melalui kerjasama *QR cross border* antara Indonesia dan Thailand, serta interkoneksi *fast payment* antara Singapura dan Thailand. Di Indonesia sendiri telah dilakukan berbagai langkah terobosan sistem pembayaran, yaitu melalui pengembangan QRIS, BI Fast, SNAP dan tim percepatan perluasan digitalisasi daerah untuk mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah.

Percepatan transformasi digital dalam bidang ekonomi dan keuangan telah menjadi bagian dari inisiatif global, terutama yang tertuang pada *G20 Roadmap for Enhancing Cross Border Payments*. Kerja sama konektivitas pembayaran kawasan ini juga sejalan dengan agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia dalam area transformasi digital. Sebagai wujud nyatanya, Presiden Joko Widodo meminta agar kerja sama ini diformalkan dalam *regional payment connectivity*.

Sistem pembayaran digital, atau yang umumnya dikenal dengan pembayaran *online* atau elektronik, adalah suatu proses transfer nilai dari suatu akun pembayaran ke akun pembayaran lainnya dengan menggunakan perangkat digital seperti sistem POS, *smartphone*, atau menggunakan komunikasi digital, seperti komputer atau data nirkabel seluler. Pada praktiknya, pembayaran ini dilakukan dengan metode transfer bank, kartu pembayaran, atau uang digital. Jadi, pembayaran digital adalah jenis pembayaran yang sifatnya *cashless*, *paperless*, dan juga *contactless*.

Dengan ditandatanganinya NK Kerja Sama Konektivitas Pembayaran Kawasan, Indonesia menghadirkan kepemimpinan dan bukti nyata transformasi digital domestik, kawasan, bahkan global. NK tersebut juga menjadi bukti kolaborasi anggota ASEAN dalam memperkuat kerja sama pembayaran bilateral yang telah ada sebelumnya. Hal ini juga akan menjadi basis kerja sama multilateral ke depan. Lebih jauh lagi, konektivitas pembayaran kawasan akan membuka jalan bagi transformasi digital ASEAN dan memperdalam integrasi keuangan kawasan. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas Presidensi Indonesia G20 2022 sekaligus menyongsong Keketuaan ASEAN tahun 2023. Akan tetapi digitalisasi sistem keuangan ini juga memiliki risiko yang perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh berbagai pihak. Risiko yang mungkin muncul diantaranya berkaitan dengan keamanan siber atau *cybersecurity*, risiko perlindungan data pribadi, dan *fintech* ilegal. BI selaku bank sentral serta otoritas terkait perlu memastikan lalu lintas pembayaran berjalan secara tertib dan aman.

Atensi DPR

Digitalisasi sistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan karena dapat menjangkau masyarakat yang tidak *bankable* dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Akan tetapi sistem ini juga memiliki berbagai risiko dan kendala. Hal inilah yang perlu diwaspadai dan menjadi perhatian bagi Komisi XI DPR RI. DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan sistem pembayaran digital baik di dalam maupun dengan dunia luar, namun sistem keamanan dan aturan antisipasi juga perlu diperhatikan oleh BI, OJK dan instansi serta otoritas terkait. Komisi XI DPR RI juga perlu mengkaji penyusunan aturan perundang-undangan terkait untuk mengembangkan sistem pembayaran ini serta meningkatkan keamanan agar dapat melindungi konsumen dari tindak kejahatan dunia maya dan berbagai risiko lainnya.

Sumber

bi.go.id, 14 November 2022;
bisnis.tempo.com, 14 November 2022;
finansial.bisnis.com, 11 november 2022;
merdeka.com, 14 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Ari Mulianta Ginting
Edmira Rivani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.